



**KAJIAN SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Pengusaha Batu Bata Di Desa Kalipucang  
Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Marta Yudha Aditya Nugraha**

**NIM 7111414094**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Lesta Karolina B. Sebayang, S.E., M.Si  
NIP 198007172008012016

Pembimbing



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si  
NIP 196908212006042001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

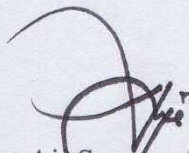
Tanggal : 15 . November 2018

Penguji I



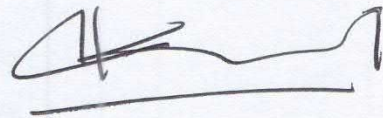
Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, SE., M.Si.  
NIP 196801022002121003

Penguji II



Deky Aji Suseno, S.E., M.Si.  
NIP 197612032003121004

Penguji III



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.  
NIP 196908212006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.BA., Ph.D.  
NIP 196307181987021001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marta Yudha Aditya Nugraha

NIM : 7111414094

TTL : Jepara, 25 Juni 1996

Alamat : Desa Kalipucang Kulon RT 02 RW 02 Kecamatan Welahan

Kabupaten Jepara

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 12 Oktober 2018



Marta Yudha Aditya Nugraha

NIM. 7111414094

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

- ❖ Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin.
- ❖ Hidup adalah masa depan, masa lalu adalah pembelajaran.

### **PERSEMBAHAN:**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta
2. Keluarga tercinta
3. Sahabat-sahabat tersayang
4. Teman-teman Ekonomi Pembangunan A 2014
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M.BA., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Lesta Karolina Br. Sebayang, S.E., M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik, dorongan, dan motivasi.
4. Prof. Rusdarti, S.E., M.Si., Dosen Wali saya yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama studi.
5. Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, SE., M.Si, Dosen Penguji I yang telah menguji serta memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Deky Aji Suseno, S.E., M.Si, Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si., Dosen pembimbing sekaligus Dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara atas bantuan dan sarannya.
9. Bapak dan Ibu perangkat Desa Kalipucang Kulon atas bantuan dan sarannya.
10. Ibu dan Bapak pemilik usaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon atas kesediaan dan waktunya untuk penelitian ini.
11. Seluruh Bapak Ibu Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 yang telah berjuang bersama.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan serta kekurangan dalam skripsi ini sehingga diperlukan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Semarang, Oktober 2018

Penulis

## SARI

**Nugraha, Marta Yudha Aditya.** 2018. “Kajian Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing, Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.

**Kata Kunci: Industri, Batu Bata, Lingkungan, CVM, Regresi Logit.**

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Tiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat. Tingginya pertumbuhan penduduk diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal yang berpengaruh terhadap permintaan batu bata di Desa Kalipucang Kulon. Banyaknya industri batu bata berdampak dengan masalah pencemaran lingkungan. Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan membayar nilai ekonomi yang telah hilang. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi perilaku sosial ekonomi pengusaha batu bata, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar, dan mengetahui nilai kesediaan membayar perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon.

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner kepada pengusaha batu bata sebagai responden. Teknik sampling menggunakan *Simple Random Sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah *Regression Binary Logistic* dan *Contingent Valuation Method (CVM)*.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden adalah laki-laki, berusia antara 26 sampai 60 tahun, dengan 87% sudah berkeluarga, dan memiliki tanggungan keluarga antara 2 sampai 6 orang. Pendidikan terakhir responden tidak tamat SD sampai SMP sebanyak 84% dan sisanya SMA dengan pendapatan berkisar antara Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 5000.000 per bulan. Tingkat kesehatan responden tergolong rendah dilihat dari banyaknya keluhan kesehatan dengan tingkat pengetahuan lingkungan yang cukup. Hasil regresi logit menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar responden adalah umur dengan nilai koefisien -0,115 dan nilai *odd ratio* 0,033, tingkat kesehatan dengan nilai koefisien 1,933 dan nilai *odd ratio* 6,910, pengetahuan pencemaran lingkungan dengan nilai koefisien 2,310 dan nilai *odd ratio* 10,076. Hasil CVM adalah dari 90 responden yang bersedia membayar sebanyak 38 dan 62 tidak bersedia membayar. Nilai yang bersedia dibayarkan berkisar antara Rp. 2000 sampai dengan Rp. 5000 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 3.107 per bulan. Sehingga nilai total yang bersedia dibayarkan untuk perbaikan kualitas lingkungan sebesar Rp. 2.644.179 per bulan atau Rp. 31.730.148 per tahun.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penyuluhan tentang dampak industri batu bata terhadap kesehatan dan lingkungan, melakukan pendampingan oleh pemerintah kepada pengusaha batu bata mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, dan kajian lanjutan agar menyertakan masyarakat umum sebagai responden.



## ABSTRAK

**Nugraha, Marta Yudha Aditya.** 2018. "Environment and Economic Study (Case Study of Brick Entrepreneurs in the Kalipucang Kelon Village Welahan district of Jepara Regency)". Essay. Department of Economics Development. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor. Dr. Amin Pujiati, S.E.,M.Si.

**Keywords: Industry, Brick, Environment, CVM, Logit Regression.**

Indonesia is a country that has a large population. Each population has increased. The high population growth was followed by increasing the houses needed or where there were residual influences the request of brick in the Kalipucang Kulon village. Much of the contribution of people is affected by environmental pollution problems. Based on these problems the need for improvement in environmental quality by paying for the economic value that has been lost. The aims of this research are to identify the economic conditions of the brick entrepreneurs, analyze the factors that influence the availability of paying, and find out about the availability of paying for improvements in the quality of the environment in Kalipucang Kelon Village.

This method of research is not descriptive analysis with quantitative approaches. The data used is primary data and secondary data. The method of collecting data by the spread of questionnaire the brick entrepreneurs as the correspondent. The sampling technique uses Simple Random Sampling. The analytical method is Regression Binary Logistics and Contingent Valuation Method (CVM).

The results of the study showed that most the respondents were men, aged between 26 and 60 years, with 87% having a family, and guaranteed of between 2 and 6 people. The last education was from Elementary to Junior High School graduates, 84% and the rest were Senior High School students with a different income. 900,000 to Rp. 5000,000 a month. The level of health of the respondent was low, seen from many complaints when the level of knowledge was sufficient. The logit regression results show the factors that influence the payout rate of age with the coefficient value of -0.115 and the odd ratio value of 0,033, the health level with the coefficient of 1.933 and the odd ratio value 6.910, the knowledge of environmental pollution with the value of coefficient 2.310 and the odd ratio value of 10.076. The CVM result is that from 90 respondents who provided pay of 38 and 62 did not pay. A value that is available is a about of Rp. 2000 to Rp. 5000 with an average value of Rp. 3,107 a month. The total value is available at a cost for the improvement of the quality of the environment at Rp. 2,644,179 a month or Rp. 31,730,148 a years.

Suggestions in the study of the need for extension of the impact of brick industry for health and the environment, accompanying the governments to the brick entrepreneurs of the importance of environmental preservation, and sustainability studies in order to include the general population of correspondents.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI DAN ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Cakupan Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian .....	11
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
1.5.1. Manfaat Praktis.....	11
1.5.2. Manfaat Teoritis .....	12
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14

2.1. Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ) .....	14
2.1.1. Industri Kecil Menengah .....	14
2.1.2. Ekonomi Lingkungan .....	16
2.1.3. Valuasi Ekonomi .....	17
2.1.4. <i>Contingent Valuation Method</i> .....	18
2.1.5. <i>Polluter Pay Principle</i> .....	24
2.2. Hubungan Variabel Dependen Terhadap Variabel Independen .....	25
2.2.1. Umur Terhadap Kesiediaan Membayar .....	25
2.2.2. Status Pernikahan Terhadap Kesiediaan Membayar .....	25
2.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Kesiediaan Membayar ....	26
2.2.4. Tingkat Kesehatan Masyarakat Terhadap Kesiediaan Membayar ...	26
2.2.5. Pengetahuan Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesiediaan Membayar .....	27
2.2.6. Pendapatan Terhadap Kesiediaan Membayar .....	28
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
2.4. Kerangka Berpikir.....	37
2.5. Hipotesis Penelitian .....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Lokasi Penelitian.....	41
3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	41
3.3. Populasi dan Sampel .....	42
3.3.1. Populasi .....	42
3.3.2. Sampel .....	42

3.4. Jenis dan Sumber Data .....	43
3.4.1. Data Primer .....	43
3.4.2. Data Sekunder .....	44
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.5.1. Kuesioner .....	44
3.5.2. Wawancara .....	45
3.5.3. Dokumentasi.....	45
3.5.4. Observasi .....	45
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	46
3.6.1 Uji Validitas .....	46
3.6.2 Uji Reliabilitas.....	48
3.7. Definisi Operasional Variabel.....	48
3.7.1 Kesiediaan Membayar Perbaikan Kualitas Lingkungan (WTP) ...	49
3.7.2 Umur.....	49
3.7.3 Status Pernikahan .....	49
3.7.4 Jumlah Tanggungan Keluarga.....	49
3.7.5 Tingkat Kesehatan.....	50
3.7.6 Pengetahuan Pencemaran Lingkungan.....	50
3.7.7 Pendapatan .....	50
3.8. Metode Analisis Data dan Alat Analisis Data .....	51
3.8.1 Analisis Regresi Logit Biner ( <i>Binary Logistic Regression</i> ) .....	52
3.8.1.1. Uji Ketepatan Klasifikasi .....	55
3.8.1.2. Uji Kesesuaian Model .....	55

3.8.1.3. Uji Signifikansi .....	57
3.8.2. <i>Contingent Valuation Methode (CVM)</i> .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	61
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
4.2. Tentang Industri Batu Bata .....	61
4.3. Perilaku Sosial Ekonomi Responden .....	63
4.3.1. Jenis Kelamin .....	63
4.3.2. Tingkat Usia .....	64
4.3.3. Status Pernikahan .....	64
4.3.4. Jumlah Tanggungan Keluarga .....	65
4.3.5. Status Kepemilikan Rumah .....	66
4.3.6. Pendidikan Terakhir .....	67
4.3.7. Tingkat Kesehatan .....	67
4.3.8. Pengetahuan Pencemaran Lingkungan .....	68
4.3.9. Tingkat Pendapatan .....	69
4.4. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Membayar Pengusaha Batu Bata Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner .....	70
4.4.1. Uji Ketepatan Klasifikasi .....	70
4.4.2. Uji Kesesuaian Model .....	71
4.4.3. Uji Signifikansi.....	72
4.4.4. <i>Odds Ratio</i> .....	76
4.4.5. Persamaan regresi Logistik.....	77



4.5. Analisis Nilai <i>Willingnes to Pay</i> (WTP) dengan Pendekatan <i>Contingent Valuation Methode</i> (CVM).....	78
4.5.1. Membangun Pasar Hipotetik .....	78
4.5.2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTP.....	79
4.5.3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP.....	79
4.5.4. Memperkirakan Kurva WTP .....	80
4.5.5. Menjumlahkan Data untuk Menentukan Total WTP (TWTP).....	81
4.6. Pembahasan.....	82
4.6.1. Perilaku Sosial Ekonomi Responden.....	82
4.6.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Membayar Pengusaha Batu Bata dalam Upaya Perbaikan Kualitas Lingkungan di Desa Kalipucang Kulon.....	83
4.6.3. Nilai <i>Willingnes to Pay</i> (WTP) Pengusaha Industri Batu Bata dalam Upaya Perbaikan Kualitas Lingkungan .....	90
BAB V PENUTUP .....	91
5.1. Simpulan .....	91
5.2. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93
LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Jumlah Industri Batu Bata di Jawa Tengah Tahun 2016 .....	3
1.2. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016 .....	4
1.3. Jumlah Industri Batu Bata di Kabupaten Jepara Tahun 2017 .....	5
1.4. Perkembangan Jumlah Industri Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Tahun 2014 – 2017 .....	6
2.1. Penelitian Terdahulu.....	29
3.1. Hasil Uji Validitas .....	47
4.1. Uji Ketepatan Klasifikasi.....	70
4.2. Hasil Uji <i>Nagelkerke R Square</i> .....	71
4.3. Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow</i> .....	72
4.4. Hasil Uji <i>Likelihood Ratio</i> Statistik ( <i>overall test</i> ) .....	72
4.5. Hasil Uji Koefisien Regresi <i>Binary Logistic: Variabels in the Equations</i> .....	73
4.6. Distribusi Nilai WTP Responden Pengusaha Industri Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon .....	79
4.7. Total WTP Responden Pengusaha Industri Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon .....	81

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Kerangka Berpikir Penelitian .....	39
4.1. Perilaku Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
4.2. Perilaku Responden Berdasarkan Tingkat Usia .....	64
4.3. Perilaku Responden Berdasarkan Status Pernikahan .....	65
4.4. Perilaku Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan .....	66
4.5. Perilaku Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah .....	66
4.6. Perilaku Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir.....	67
4.7. Perilaku Responden Berdasarkan Tingkat Kesehatan .....	68
4.8. Perilaku Responden Berdasarkan Pengetahuan Pencemaran Lingkungan.....	68
4.9. Perilaku Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan .....	69
4.10. Kurva Permintaan WTP Pengusaha Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon .....	80

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Rekomendasi Permohonan Data Dari Kesbangpol .....	97
2. Surat Permohonan Data Kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon .....	98
3. Instrumen Penelitian .....	99
4. Tabulasi Data Penelitian .....	102
5. Hasil Regresi Logistik dengan Metode Enter .....	106
6. Dokumentasi Penelitian .....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil survey oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 adalah sebanyak 261 juta jiwa. Salah satu pulau dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pulau Jawa. Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Menurut BPS, pada tahun 2017 jumlah penduduk pulau Jawa mencapai lebih dari 148 juta jiwa atau sekitar 56% dari jumlah penduduk Indonesia. Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi nomor tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, yakni 34.257.900 jiwa. Tiap tahun jumlah penduduk di Jawa Tengah selalu meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat untuk tinggal.

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia setelah sandang dan pangan. Dalam konteks ini tempat tinggal berarti bangunan rumah yang digunakan untuk berlindung dan menetap (Juhana, 2000). Permintaan masyarakat terhadap rumah masih sangat tinggi. Berdasarkan data Bank BTN pada tahun 2016, permintaan rumah masih cukup tinggi khususnya di provinsi yang padat penduduk seperti di daerah Jawa Tengah yakni 860.385 unit (Nisaputra, 2018). Fenomena yang terjadi di Jawa Tengah yaitu kekurangan *backlog* atau



perumahan bagi masyarakat yang masih cukup tinggi, bahkan mencapai 2,8 juta unit yang terdiri dari rumah tidak layak huni, dari sisi kepemilikan, dan dari sisi kepenghunan. Jumlah *backlog* perumahan tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan jumlahnya akan semakin meningkat dengan banyaknya jumlah orang yang menikah setiap tahun (Kementerian PUPR, 2018). Semakin meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, semakin besar juga kebutuhan akan bahan baku untuk pembuatan bangunan. Salah satu bahan bakunya adalah batu bata yang merupakan bahan baku untuk pondasi bangunan.

Selain itu, permintaan akan batu bata juga dipengaruhi oleh program rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tentang pembangunan rumah yang berkelanjutan, layak, terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, meningkatkan pemerataan, serta terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan program satu juta rumah yang telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2015 dengan pengerjaan yang dilakukan secara bertahap.

Batu bata merupakan bahan baku bangunan yang sering digunakan oleh masyarakat karena harganya murah dan mudah untuk diperoleh. Bahan baku pembuatan batu bata tergolong sangat mudah yaitu tanah lempung dan air. Industri batu bata merupakan industri yang meliputi pertambangan bahan galian golongan C (tanah), dengan proses pengolahan, pencetakan, penjemuran, pembakaran hingga tahap pemasaran. Industri batu bata juga merupakan industri kerakyatan yang menjadi mata pencaharian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persebaran industri batu bata hanya terdapat di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Industri Batu Bata di Jawa Tengah Tahun 2016**

No	Kabupaten	Jumlah Industri Batu Bata (Unit)
1	Banjarnegara	782
2	Batang	337
3	Blora	167
4	Boyolali	167
5	Brebes	202
6	Demak	284
7	Grobogan	627
<b>8</b>	<b>Jepara</b>	<b>1.472</b>
9	Klaten	1.100
10	Pati	830
11	Pekalongan	970
12	Purworejo	558
13	Sragen	970
14	Temanggung	387
	Total	8.935

Sumber: BPS Jawa Tengah 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1. salah satu kabupaten yang memiliki jumlah industri batu bata terbanyak adalah Kabupaten Jepara dengan jumlah 1.472 unit. Hal ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Jepara merupakan salah satu penyedia batu bata sebagai bahan baku perumahan terbanyak diantara kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantura timur dan berbatasan langsung dengan laut jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (2010) sektor industri merupakan tiang penyangga

utama daripada perekonomian Kabupaten Jepara. Mayoritas industri di Kabupaten Jepara tergolong ke dalam industri kecil dan industri rumah tangga. Industri kecil menengah di Kabupaten Jepara jumlahnya semakin meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. yang menunjukkan pertumbuhan jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 – 2016.

**Tabel 1.2.**  
**Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah IKM</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
2012	9.959	87.556
2013	13.263	117.243
2014	14.720	128.640
2015	18.695	143.538
2016	19.380	148.079

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2013-2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2. terlihat bahwa pertumbuhan jumlah industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yang artinya di Kabupaten Jepara semakin banyak yang lebih memilih untuk membuka usaha sendiri dan penyerapan tenaga kerja semakin tinggi.

Selain industri kerajinan ukir atau *furniture* kayu yang menjadi ciri khas, Kabupaten Jepara juga banyak memiliki industri berskala rumahan seperti tenun ikat, monel, gerabah, genteng, anyaman, kerajinan kayu, makanan, konveksi, bordir, mainan anak, dan batu bata. Salah satu industri rumahan yang sampai saat ini masih berkembang yaitu industri batu bata. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di

perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri batu bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Permintaan akan batu bata sampai saat ini masih cukup tinggi dikarenakan batu bata merupakan bahan utama dalam suatu pembangunan seperti pondasi rumah, pembangunan gedung, gapura, tugu, jembatan, dll. Berikut merupakan data persebaran industri batu bata di Kabupaten Jepara.

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Industri Batu Bata di Kabupaten Jepara Tahun 2017**

No	Desa	Jumlah Industri Batu Bata (unit)
1	Mayong Lor	66
2	Mayong Kidul	13
3	Sengonbugel	38
4	Kalipucang Wetan	586
5	Kalipucang Kulon	851

Sumber: Disperindag Kab.Jepara, 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3. jumlah industri batu bata terbanyak berada di Desa Kalipucang Kulon, yaitu dengan jumlah 851 unit. Desa Kalipucang Kulon menjadi desa dengan jumlah industri batu bata terbanyak di Kabupaten Jepara. Hal ini juga dikarenakan Desa Kalipucang Kulon merupakan sentra industri batu bata skala rumahan yang berada di Kabupaten Jepara. Kerajinan batu bata di Desa Kalipucang Kulon pada awalnya merupakan usaha sampingan bagi para petani untuk mencari pendapatan lain di luar sektor pertanian. Namun, kini banyak petani yang mulai tertarik untuk mengembangkan industri batu bata dibandingkan dengan usaha

pertanian karena industri batu bata dianggap lebih menguntungkan sehingga jumlah pengusaha industri batu bata semakin meningkat.

Menurut Kementerian Desa Klipucang Kulon (2016) potensi unggulan yang dimiliki Desa Kalipucang kulon adalah produksi batu bata yang dimana sebagian penduduk di Desa kalipucang Kulon mayoritas pekerjaannya adalah sebagai pengrajin batu bata hampir 80% dari total penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4. yang menunjukkan perkembangan jumlah usaha industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon pada tahun 2014 – 2017.

**Tabel 1.4.**  
**Perkembangan Jumlah Usaha Industri Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Tahun 2014 – 2017**

No	Tahun	Jumlah Usaha Batu Bata (unit)
1	2014	505
2	2015	640
3	2016	742
4	2017	851

Sumber: Pemerintah Desa Kalipucang Kulon, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4. dapat dilihat dari tahun 2014 – 2017 jumlah unit usaha industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon selalu mengalami peningkatan. Semula pada tahun 2014 hanya ada 505 unit usaha industri batu bata menjadi 851 unit usaha industri batu bata pada tahun 2017. Hal ini membuktikan bahwa potensi industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon sangat baik.

Potensi industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon yang sangat baik berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi penduduk desa yang mengembangkan usaha batu bata. Industri batu bata ini menjadi mata pencaharian



utama dan penyerapan tenaga kerja yang telah menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat di Desa Kalipucang Kulon. Namun dari berkembang pesat dan semakin bertambahnya industri batu bata juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Menurut penelitian Veronika (2015), banyak dampak negatif yang ditimbulkan pada produksi industri batu bata rumahan tersebut, seperti kondisi jalan yang rusak akibat sering dilalui truk yang mengangkut tanah maupun batu bata yang sudah jadi pada tiap harinya, menurunnya kualitas tanah sehingga menjadi tidak subur, pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan akibat asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran batu bata. Hal serupa juga terjadi pada industri batu bata yang berada di Desa Kalipucang Kulon.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Nursia & Harudu (2016) juga menjelaskan bahwa proses pembakaran pada industri batu bata meningkatkan polusi udara. Proses pembakaran yang memerlukan waktu tiga sampai empat hari dapat meningkatkan polusi udara (Nox dan CO<sub>2</sub>) disekitar lokasi industri. Terjadi peningkatan polusi udara yaitu asap pada saat proses pembakaran batu bata menyebabkan kualitas udara di sekitar kawasan pembakaran menurun. Selain polusi udara, dampak lain yaitu rusaknya permukaan bekas penambangan batu bata yang tidak teratur mengakibatkan hilangnya lapisan tanah yang subur sehingga kualitas tanah kawasan pertambangan menjadi menurun.

Sedangkan dampak industri batu bata terhadap kesehatan juga perlu diperhatikan. Asap yang timbul dari pembakaran kayu untuk proses pembakaran batu bata sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan warga sekitar. Pasalnya,

pembakaran kayu ini menyebabkan pekerja dan warga sekitar mengalami gangguan pernapasan dan aktivitas sehari-hari (Rasyid, 2014). Dengan kualitas udara yang menurun dan banyaknya debu dari sisa proses pembakaran, hal ini akan memicu penyakit pernapasan seperti halnya batuk-batuk, sesak napas, TBC, dan yang paling parah adalah penyakit jantung.

Minimnya pengetahuan pencemaran lingkungan oleh masyarakat dan tidak adanya upaya dalam mengatasi pencemaran lingkungan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab kualitas lingkungan yang semakin menurun. Menurunnya kondisi lingkungan akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang (Pujiati, Nihayah, & Bowo, 2017). Dari penjelasan yang telah diuraikan tentunya dapat diketahui bahwa usaha batu bata mempunyai dampak lingkungan yang apabila tidak ditangani keadaannya akan semakin buruk dan berdampak terhadap kondisi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Namun faktanya usaha produksi batu bata justru semakin meningkat tanpa adanya upaya dalam mengatasi masalah lingkungan.

Jika masyarakat ingin kembali kepada lingkungan yang sehat dan berkurangnya pencemaran atau polusi, maka masyarakat harus rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membayarnya. Ini dianggap sebagai nilai ekonomi yang hilang akibat pencemaran. Kesiediaan membayar atau *willingness to pay* (WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, dapat juga diartikan jumlah uang yang ingin diberikan oleh seseorang untuk memperoleh suatu peningkatan kondisi lingkungan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya (Eriyati, Indrawati, & Anggreina, 2010). Kesiediaan

membayar dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon sebagai pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, sejalan dengan teori *polluters pay principle* yang menjelaskan prinsip pencemar harus membayar dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”**.

## **1.2. Cakupan Masalah**

Penelitian ini memaparkan tentang “Kajian Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus Pengusaha Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)” Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan akibat dari dampak industri batu bata. Variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesediaan membayar masyarakat yaitu usia, status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat kesehatan, pengetahuan pencemaran lingkungan, dan pendapatan. Mengetahui nilai yang bersedia dibayarkan oleh pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan. Responden dalam penelitian ini ditujukan hanya untuk pengusaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara sebagai tempat penelitian. Tujuan pembatasan cakupan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas karena keterbatasan peneliti dari segi kemampuan, waktu, tenaga, serta biaya yang digunakan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Permintaan permukiman di Jawa Tengah masih sangat tinggi yaitu sebanyak 860.385 unit pada tahun 2016, hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah dengan permintaan permukiman tertinggi kedua di Jawa. Meningkatnya permintaan akan permukiman akan diikuti dengan meningkatnya permintaan material sebagai bahan baku pembuatan rumah, fenomena tersebut juga berdampak pada peningkatan permintaan batu bata sebagai salah satu bahan baku utama di Desa Kalipucang Kulon sebagai desa sentra industri batu bata. Hal ini juga diakibatkan dari adanya program pembangunan sejuta rumah oleh pemerintah. Disamping perkembangan industri batu bata yang semakin meningkat, kegiatan pada industri batu bata menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, menurunnya kualitas tanah, dan menyebabkan gangguan pernapasan. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu adanya perbaikan kualitas lingkungan agar tidak semakin buruk. Perbaikan kualitas lingkungan jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, diperlukan kesediaan membayar nilai ekonomi lingkungan dari pengusaha batu bata sebagai pelaku usaha dari dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perilaku sosial ekonomi pengusaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon?

- c. Berapa besarnya nilai kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi perilaku sosial ekonomi pengusaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon.
- c. Untuk menganalisis besarnya nilai kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1.5.1. Manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah Desa Kalipucang Kulon untuk melakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan yang diakibatkan dari dampak industri batu bata. Disamping itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi terkait dalam memecahkan masalah upaya pelestarian lingkungan dan memberikan saran yang bermanfaat bagi instansi

terkait. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pengusaha batu bata dan masyarakat mengenai dampak industri batu bata.

### **1.5.2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi penelitian, khususnya tentang kajian sosial ekonomi dan lingkungan pengusaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon, serta dapat dipergunakan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya baik dalam model, cara analisis, maupun hasilnya.

### **1.6. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memadukan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Amanda (2009) yang berjudul "*Analisis Willingness to Pay Pengunjung Obyek Wisata Danau Situgede Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan*". Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dalam penelitian tersebut yaitu jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, pengetahuan mengenai lingkungan Danau Situgede, frekuensi kunjungan, domisili dan biaya kunjungan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gita Herdiani (2009) yang berjudul "*Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Perbaikan Lingkungan Perumahan*". Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dalam penelitian tersebut yaitu pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, luas tempat tinggal, lama tinggal, dan status kepemilikan tempat tinggal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah umur, status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga,

pengetahuan pencemaran lingkungan, pendapatan. Selanjutnya peneliti menambahkan variabel tingkat kesehatan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar pengusaha batu bata dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan. Kebaruan lainnya pada penelitian ini yaitu peneliti mencoba menentukan responden dengan *polluter pay principle* atau prinsip pencemar yang harus membayar, sehingga responden yang dipilih adalah pengusaha industri batu bata yang merupakan pelaku dari adanya pencemaran lingkungan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)**

Kajian teori utama (*grand theory*) dimaksudkan untuk memberikan rujukan dalam penyusunan kerangka berpikir yang menguraikan keterkaitan atau hubungan kausalitas diantara variabel-variabel penelitian. Berikut kajian teori utama dalam penelitian ini antara lain:

##### **2.1.1. Industri Kecil Menengah**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No.6 Tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah.



Peraturan Menteri Perindustrian menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah yaitu:

1. Perusahaan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil (IK) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
2. Perusahaan industri menengah yang selanjutnya disebut industri menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Industri kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan industri yang terdiri dari industri kecil (IK) dan industri menengah (IM).

Berdasarkan dari beberapa definisi, industri kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam antara lain sebagai berikut Fafurida & Nihayah (2011):

- a. Skala usaha yang kecil, baik modal, tenaga kerja yang digunakan maupun orientasi pasar.
- b. Status usaha merupakan milik pribadi atau keluarga sehingga tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.
- c. Modal sangat terbatas, sehingga sering terkendala dengan kurangnya modal kerja. Umumnya sumber modal merupakan sendiri dan lingkungan pribadi.
- d. Mayoritas berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.

- e. Kemampuan yang terbatas dalam menerima transfer teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.
- f. Tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) di sekitarnya. Direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga. Bahkan kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- g. Tidak memiliki Izin usaha dan persyaratan formal usaha lainnya.
- h. Pola kerja hanya sebagai part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan utama lainnya.
- i. Strategi usaha sangat dipengaruhi kondisi lingkungannya yang sering berubah cepat.

### **2.1.2. Ekonomi Lingkungan**

Ekonomi lingkungan atau ilmu ekonomi lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan keadaan lingkungan disekitarnya yang memiliki keterbatasan sehingga fungsi atau peranan SDA dan lingkungan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan.

Dalam Undang-undang PLH No. 23 tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lainnya. Fungsi dan peranan lingkungan yang utama berdasarkan UU tersebut adalah sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi, sebagai *assimilator* (sebagai pengolah limbah secara alami), dan sebagai sumber kesenangan.

Semakin meningkatnya pembangunan dan kegiatan industri untuk peningkatan kesejahteraan manusia ternyata telah menurunkan fungsi dan peranan lingkungan dari waktu ke waktu. Kemampuan alam untuk mengolah limbah juga menurun karena terlalu banyak limbah-limbah yang harus ditampung. Jumlah limbah yang harus ditampung melebihi daya tampung lingkungan, dan kemampuan alam menyediakan kesenangan juga semakin berkurang karena banyak sumber daya alam dan lingkungan yang telah diubah fungsinya atau karena meningkatnya pencemaran (Suparmoko, 2010).

### **2.1.3. Valuasi Ekonomi**

Kajian mengenai valuasi ekonomi membahas tentang masalah nilai lingkungan atau harga lingkungan. Tujuan dari valuasi ekonomi adalah untuk memberikan nilai ekonomi terhadap sumber daya yang digunakan sesuai dengan nilai riil dari sudut pandang masyarakat. Valuasi lingkungan hidup merupakan suatu bagian integral dan prioritas sektoral dalam mendeterminasi keseimbangan antara konservasi dan pembangunan (Alfian, 2004).

Menurut Fadhilah (2015) valuasi ekonomi adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam menentukan nilai kuantitatif terhadap suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan dan sumber daya alam terlepas dari nilai pasar baik tersedia atau tidak. Berdasarkan analisis non-pasar (*non-market*) valuasi ekonomi

dapat digunakan dalam hal pemberian nilai moneter pada produk barang dan jasa yang tidak dipasarkan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2012) pada konsep metode valuasi ekonomi, penetapan nilai ekonomi kerusakan lingkungan maupun nilai ekonomi total yaitu dengan menggunakan pendekatan harga pasar dan pendekatan harga non pasar. Pada harga pasar dapat dilakukan dengan pendekatan produktivitas, pendekatan modal manusia (*human capital*) atau pendekatan nilai hilang (*foregone earning*) dan pendekatan biaya kesempatan (*opportunity cost*). Adapun beberapa pendekatan non pasar dapat menggunakan metode biaya perjalanan (*travel cost*), metode nilai hedonis (*hedonic pricing*), metode kesediaan menerima ganti rugi atau kesediaan membayar (*contingent valuation*) dan metode benefit transfer.

#### **2.1.4. *Contingent Valuation Method***

*Contingent Valuation Method* adalah metode yang digunakan saat ini, karena CVM dapat mengukur nilai penggunaan (*use value*) dan nilai non penggunaan (*non-use value*) dengan baik (Yakin, 1997). Pendekatan CVM pertama kali dikenalkan dalam penelitian mengenai perilaku perburuan di Miami. Pendekatan ini secara teknis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan teknik eksperimental melalui simulasi dan permainan. Kedua dengan teknik survei. *Contingent Valuation Method* (CVM) ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan untuk membayar (*Willingness to Pay*) dan kesediaan untuk menerima (*Willingness to Accept*).

**a. Kelebihan *Contingent Valuation Method* (CVM)**

Menurut Hanley & Spash (1993), kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan CVM dalam memprediksikan nilai ekonomi suatu lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Dapat diterapkan pada semua kondisi dan mempunyai dua hal penting yaitu sering menjadi teknik satu-satunya untuk mengestimasi manfaat dan dapat diterapkan pada berbagai konteks kebijakan lingkungan.
2. Dapat digunakan untuk penilaian berbagai macam barang barang lingkungan di sekitar masyarakat.
3. Dibandingkan dengan teknik penilaian lingkungan lainnya, CVM memiliki kemampuan untuk mengestimasi nilai non pengguna. Dengan CVM, kemungkinan seseorang dapat mengukur utilitas dari penggunaan barang lingkungan bahkan jika tidak digunakan secara langsung.
4. Meskipun teknik dalam CVM membutuhkan analisis yang kompeten, namun hasil penelitian menggunakan metode ini tidak sulit untuk dianalisis dan dijabarkan.

**b. Kelemahan *Contingent Valuation Method* (CVM)**

Menurut Hanley & Spash (1993), keterbatasan utama dari penggunaan CVM memiliki keterbatasan utama yaitu timbulnya bias, yang terjadi apabila dalam penggunaan CVM timbul nilai WTP/WTA yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Beberapa hal yang menyebabkan Bias tersebut antara lain:

1. Bias Strategi (*Strategic Bias*), yaitu bias yang disebabkan karena barang lingkungan memiliki sifat "*non-excludability*" dalam pemanfaatannya

sehingga responden akan terdorong untuk bertindak sebagai “*free rider*” dan tidak jujur dalam memberikan informasi.

2. Bias rancangan (*Design Bias*), yaitu mencakup cara penyajian informasi, instruksi yang diberikan, format pertanyaan, dan jumlah serta tipe informasi yang disajikan kepada responden.
3. Bias yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan responden (*mental account bias*), yang berhubungan dengan langkah seorang individu dalam proses pembuatan keputusan seberapa besar pendapatan, kekayaan dan waktunya dihabiskan untuk barang lingkungan tertentu dalam periode waktu tertentu.
4. Kesalahan pasar hipotesis (*Hypothetical Market Error*), terjadi jika fakta yang ditanyakan kepada responden dalam pasar hipotesis membuat responden menanggapi berbeda dengan konsep yang diinginkan peneliti sehingga nilai WTP yang dihasilkan menjadi berbeda dengan nilai sesungguhnya.

**c. Tahapan dalam *Contingent Valuation Method* (CVM)**

Tahapan dalam penerapan analisis CVM menurut Fauzi (2010), adalah sebagai berikut:

1. Membuat Pasar Hipotetik (*Setting Up the Hypotetical Market*)

Pasar hipotetik dibangun untuk memberikan alasan masyarakat mengapa harus membayar terhadap suatu barang atau jasa lingkungan dimana tidak terdapat nilai dalam mata uang untuk harga barang atau jasa lingkungan tersebut. Bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan harus

ditunjukkan oleh pasar hipotetik. Pada kuesioner harus menguraikan secara jelas skenario kegiatan sehingga responden dapat memahami barang lingkungan yang dipertanyakan serta keterlibatan masyarakat dalam rencana kegiatan. Selain itu, dalam kuesioner perlu dijelaskan perubahan yang akan terjadi jika terdapat keinginan masyarakat untuk membayar.

## 2. Mendapatkan Penawaran Besarnya Nilai WTP

Penawaran besarnya nilai WTP dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dapat melakukannya melalui wawancara dengan tatap muka, perantara telepon, atau dengan menggunakan surat. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai WTP, yaitu:

- a. Metode Tawar Menawar (*Bidding Game*), yaitu metode penawaran kepada responden dengan penawaran sebuah nilai tertentu dengan menawarkan mulai nilai terkecil hingga nilai terbesar yang sanggup dibayarkan oleh responden.
- b. Metode Pertanyaan Pilihan Dikotomi (*Closed-ended Referendum*), yaitu metode yang ditawarkan kepada responden dengan pilihan sejumlah uang tertentu dan menanyakan apakah responden bersedia untuk membayar atau tidak.
- c. Metode Kartu Pembayaran (*Payment Card*), yaitu metode menawarkan kepada responden dimana responden dapat memilih nilai maksimal atau minimal sesuai dengan keinginannya dalam bentuk kartu.

d. Metode Pertanyaan Terbuka (*Open-ended Question*), yaitu metode penawaran dengan bertanya langsung kepada responden berapa jumlah maksimal yang ingin dibayarkan.

### 3. Memperkirakan Nilai Rata-rata WTP (*Calculating Average WTP*)

Perhitungan nilai penawaran menggunakan nilai rata-rata, maka akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, oleh karena itu lebih baik digunakan nilai tengah agar tidak dipengaruhi oleh rentang penawaran yang cukup besar. Nilai tengah penawaran selalu lebih kecil daripada nilai rata-rata penawaran. Dalam penelitian ini, dapat menduga WTP dengan menggunakan nilai rata-rata dari penjumlahan keseluruhan nilai WTP dan membaginya dengan jumlah responden. Dugaan rata-rata WTP dihitung dengan rumus:

$$EWTP = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n}$$

Dimana:

EWTP : Dugaan rata-rata WTP

$W_i$  : Nilai WTP ke- $i$

$n$  : Jumlah responden

$i$  : Responden ke- $i$  yang bersedia membayar ( $i=1,2,3, \dots, n$ )

### 4. Memperkirakan Kurva WTP (*Estimating Bid Curve*)

Memperkirakan kurva WTP dapat dengan menggunakan nilai WTP yang telah didapatkan. Kurva WTP dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai WTP karena perubahan sejumlah variabel independen yang berhubungan dengan mutu lingkungan. Selain itu, kurva WTP dapat pula digunakan untuk menguji sensitivitas jumlah WTP terhadap variasi



perubahan mutu lingkungan. Kurva penawaran dapat dibuat dengan beberapa cara:

- a. WTP diregresikan sebagai variabel tidak bebas (*dependent variable*) dengan beberapa variabel bebas.

$$W = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Dimana:

W : Besarnya nilai WTP

X : Variabel bebas (faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya WTP)

- b. Menggunakan jumlah kumulatif dari jumlah individu yang menjawab suatu nilai WTP. Asumsi dari cara ini adalah individu yang bersedia membayar suatu nilai WTP tertentu akan bersedia pula membayar suatu nilai WTP yang lebih kecil.

#### 5. Menjumlahkan Data (*Agregating Data*)

Penjumlahan data adalah proses dimana nilai tengah penawaran dikonversikan terhadap total populasi yang dimaksud. Setelah menduga nilai tengah WTP maka dapat diduga nilai total WTP dari pengunjung.

Rumus total WTP adalah sebagai berikut:

$$TWTP = \sum_{i=1}^n WTP_i n_i$$

Dimana:

TWTP : Total WTP

WTP<sub>i</sub> : WTP individu sampel ke-i

n<sub>i</sub> : Jumlah ke-i yang bersedia membayar WTP

i : Responden ke-i yang bersedia membayar (i=1, 2, 3, ..., n).

### 2.1.5. *Polluter Pay Principle*

E.J. Mishan dalam *the cost of economic growth* pada tahun enam puluhan memperkenalkan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar) yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Prinsip ini pada awal tahun 1972 mulai dianut oleh negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (*organisation of economic co-operation and development/OECD*) yang pada intinya menyebutkan bahwa pencemar harus membayar biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan (Rangkuti, 2000).

Seorang pakar ekonomi, John Maddox memberikan argumentasi bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah ekonomi. Lebih lanjut diuraikan bahwa “*we can reduce pollution if we are prepared to pay for it*”, yang dapat dipahami bahwa seberapa besar kemampuan membayar baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (*anti pollutions*) maupun secara tidak langsung dengan membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran (Silalahi, 2001).

Asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) ini lebih menekankan pada segi ekonomi, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembebanannya. Di Indonesia sendiri *polluter pays principle* telah diadopsi kedalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang didalamnya menjelaskan mengenai asas pencemar membayar (*polluter pay principle*), tercantum pada pasal 2 huruf (J), yang dimaksudkan dengan asas pencemar membayar adalah “bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan atau

kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

Proses pembakaran pada industri batu bata berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan akibat pencemaran dari industri batu bata, maka sudah logis kalau hal itu dibebankan pada pengusaha batu bata sebagai pemilik dari industri batu bata.

## **2.2. Hubungan Variabel Dependen Terhadap Variabel Independen**

### **2.2.1. Umur Terhadap Kesiediaan Membayar**

Menurut Elizabeth (1998) umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Tingkat kematangan dalam berpikir dan bekerja akan semakin baik apabila seseorang semakin cukup umur. Sejalan dengan pendapat Notoadmodjo (2003) bahwa semakin bertambahnya umur pengetahuan yang didapat akan semakin banyak dan daya tangkap serta pola pikir seseorang akan semakin berkembang. Hal ini menunjukkan semakin tinggi usia responden akan bersedia dalam membayar dalam perbaikan kualitas lingkungan, dikarenakan tingkat pengetahuan yang tinggi responden akan lebih peduli dengan keadaan lingkungan serta upaya menjaga diri untuk hidup lebih sehat. Menurut penelitian Sylvia Amanda (2009), umur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiediaan membayar dalam upaya pelestarian lingkungan.

### **2.2.2. Status Pernikahan Terhadap Kesiediaan Membayar**

Status pernikahan adalah status dari mereka yang terikat dalam hubungan pernikahan. Menurut Ramadhan Rajabu (2015), status pernikahan erat kaitanya terhadap kesiediaan membayar dalam pengelolaan lingkungan. Orang yang sudah

menikah kebutuhannya akan lebih banyak daripada yang belum menikah, terutama pada kepala keluarga yang harus menanggung kebutuhan dari keluarganya. Hal ini menunjukkan orang yang berstatus belum menikah akan cenderung bersedia membayar dibandingkan dengan orang yang berstatus sudah menikah. Menurut penelitian Ramadhan Rajabu Sizya (2015), status pernikahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar pengelolaan limbah padat di Kota Mwanza.

### **2.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Kesediaan Membayar**

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya jumlah orang dalam suatu keluarga yang masih menjadi tanggungan kepala keluarga yang biasanya terdiri dari keluarga utama yaitu suami, istri, dan anak-anaknya. Jumlah tanggungan keluarga akan sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Apabila jumlah tanggungan keluarga banyak maka pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan juga akan semakin banyak begitu pula sebaliknya. Hal tersebut akan mempengaruhi kesediaan membayar responden dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.

Menurut Gita Herdiani (2009) jumlah tanggungan keluarga berpengaruh negatif dengan kesediaan responden dalam membayar biaya perbaikan kualitas lingkungan karena semakin banyak tanggungan maka pengeluaran yang dilakukan akan semakin banyak pula dan kesediaan membayar akan semakin kecil.

### **2.2.4. Tingkat Kesehatan Masyarakat Terhadap Kesediaan Membayar**

Menurut Mu'rifah (2007) kesehatan adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup

dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Susenas 2017 tingkat kesehatan seseorang dapat diindikasikan dari adanya keluhan kesehatan pada diri seseorang. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Menurut Susenas 2017 keluhan kesehatan yang dialami masyarakat biasanya berupa panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi, dan orang yang mempunyai penyakit tertentu. Tingkat kesehatan dapat ditentukan melalui indikasi adanya keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir. Jika pada satu bulan terakhir tidak ada keluhan kesehatan yang dialami berarti tingkat kesehatan dikategorikan baik, begitu pula sebaliknya.

Tingkat kesehatan responden akan mempengaruhi kesediaan membayar. Hal ini dikarenakan responden akan mengharapkan tingkat kesehatan yang baik untuk dirinya. Dengan kualitas lingkungan yang baik akan menimbulkan dampak yang baik secara tidak langsung bagi kesehatan.

#### **2.2.5. Pengetahuan Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesediaan Membayar**

Pengetahuan merupakan hasil dari tidak tahu menjadi tahu, ini terjadi karena seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Peningkatan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penciuman, penglihatan, pendengaran, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan & Dewi, 2010).

Pengetahuan merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku seseorang karena pengetahuan dapat menimbulkan perubahan persepsi dan

kebiasaan masyarakat. Pengetahuan yang meningkat dapat merubah persepsi masyarakat tentang penyakit. Meningkatnya pengetahuan juga dapat mengubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi positif, selain itu pengetahuan juga membentuk kepercayaan (Wawan & Dewi, 2010).

Berdasarkan definisi pengetahuan dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pencemaran lingkungan yaitu pengetahuan yang diperoleh responden tentang pencemaran lingkungan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Responden dapat menilai kualitas lingkungan karena secara langsung merasakan dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Pengetahuan pencemaran pada lingkungan akan mempengaruhi kesediaan membayar perbaikan kualitas lingkungan oleh responden. Sejalan dengan penelitian Aman et al. (2012) yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan tentang isu-isu lingkungan akan meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan, hal ini dapat berpengaruh terhadap sikap positif terhadap lingkungan. Menurut penelitian Sylvia Amanda (2009), pemahaman pencemaran lingkungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar dalam upaya pelestarian lingkungan.

#### **2.2.6. Pendapatan Terhadap Kesediaan Membayar**

Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Sukirno, 2006). Setiap orang yang bekerja menginginkan pendapatan atau keuntungan yang maksimal supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesediaan membayar sebagai tindakan ekonomi responden diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Menurut pendapat Selan (2003), tingkat

pendapatan memiliki kaitan yang sangat erat dengan besarnya kesediaan membayar masyarakat. Semakin tinggi tingkat penghasilan seorang individu semakin tinggi pula kemampuan ekonominya sehingga semakin tinggi kemampuan dan kesempatan individu tersebut untuk bisa membayar biaya perbaikan kualitas lingkungan, sehingga pendapatan diharapkan mempengaruhi secara positif kesediaan membayar responden serta besarnya WTP yang bersedia mereka bayarkan.

### 2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa referensi dari penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Peneliti: Sylvia Amanda (2009)  Judul: <i>Analisis Willingness to Pay Pengunjung Obyek Wisata Danau Situgede Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan</i>	Analisis Regresi Linear Berganda  Analisis Regresi Logistik Biner  <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM)	Variabel dependen: kesediaan membayar dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan Danau Situgede  Variabel independen: jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, pengetahuan lingkungan Danau Situgede, frekuensi kunjungan,	Pengunjung obyek wisata Danau Situgede sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 17-23 tahun dan berstatus belum menikah serta tidak memiliki tanggungan. Mayoritas pengunjung pelajar dan mahasiswa dengan tingkat pendapatan berkisar Rp. 150.000 sampai dengan Rp.

			domisili, dan biaya kunjungan.	1.312.500 dan berdomisili yang relatif dekat dengan obyek wisata. Responden yang bersedia membayar sebanyak 81 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar yaitu usia, pendidikan, dan pemahaman pencemaran lingkungan. Nilai rata-rata kesediaan membayar sebesar Rp. 3.588 sedangkan nilai total sebesar Rp. 2.342.000 per bulan.
2.	Peneliti: Gita Herdiani (2009)  Judul: Analisis <i>Willingnes to Pay</i> Masyarakat Terhadap Perbaikan Lingkungan Perumahan (Kasus Perumahan Bukit Cimanggu City RW 10)	Analisis Regresi Linear Berganda  Analisis Regresi Logistik Biner  <i>Contingent Valuation Method</i> (CVM)	Variabel dependen: kesediaan membayar biaya perbaikan lingkungan  Variabel independen: tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, luas tempat tinggal, dan lama tinggal.	Responden yang bersedia membayar sebanyak 80 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar yaitu tingkat pendapatan luas tempat tinggal, dan status tempat tinggal. Nilai rata-rata kesediaan membayar responden adalah sebesar Rp. 69.380 per rumah tangga. Nilai total kesediaan membayar sebesar Rp. 5.296.250 per bulan, sehingga nilai total kesediaan



				membayar adalah sebesar Rp. 63.555.000 dalam satu tahun.
3.	<p>Peneliti: Frizka Amalia (2011)</p> <p>Judul: Analisis Kesediaan Membayar Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Obyek Wisata Tirta Jangari, Waduk Cirata, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p> <p>Analisis Regresi Logistik Biner</p> <p><i>Contingent Valuation Method (CVM)</i></p>	<p>Variabel dependen: kesediaan membayar masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan</p> <p>Variabel independen masyarakat sekitar obyek wisata: jenis kelamin, jumlah tanggungan, tingkat Pendidikan, lama usaha, pengetahuan lingkungan waduk, dan tingkat pendapatan</p> <p>Variabel independen pengunjung: jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat Pendidikan, jarak, tingkat pendapatan, frekuensi kunjungan, biaya kunjungan, dan pengetahuan lingkungan waduk.</p>	<p>Karakteristik masyarakat sekitar obyek wisata berusia antara 43- 52 tahun dengan status menikah. Jumlah tanggungan yang dimiliki sebanyak lebih dari tiga orang. Pendidikan terakhir mayoritas SD dan lama usaha lebih dari sebelas tahun dengan tingkat pendapatan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000. Sedangkan karakteristik pengunjung obyek wisata mayoritas berjenis kelamin pria dengan status sudah menikah. Usia antara 40 – 49 tahun dan jumlah tanggungan sebanyak dua orang. Pendidikan terakhir pengunjung yaitu SLTA dan mayoritas berprofesi sebagai wirusaha. Tingkat pendapatan antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3000.000. Responden dari</p>

				<p>masyarakat sekitar obyek wisata yang bersedia membayar sebanyak 70 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar adalah jenis kelamin dan lama usaha. Sedangkan responden dari pengunjung yang bersedia membayar sebanyak 77 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar adalah tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan. Nilai rata-rata kesediaan membayar adalah sebesar Rp. 5.357 pada masyarakat dan Rp. 7.413 pada pengunjung. Nilai total kesediaan membayar responden sebesar Rp. 16.200.000 oleh masyarakat dan Rp. 124.435.289 pada tiap tahunnya.</p>
4.	<p>Peneliti: Rong Liu et al., (2018)</p> <p>Judul: <i>Willingnes to Pay for Improved Air Quality and</i></p>	<p>Analisis Regresi Logistik Biner</p>	<p>Variabel dependen: kesediaan membayar untuk peningkatan kualitas udara</p> <p>Variabel independen: jenis kelamin, status</p>	<p>Karakteristik responden hampir 80% berusia antara 18 sampai 49 tahun dengan mayoritas adalah pria. Usia responden memiliki pengaruh secara signifikan terhadap</p>

	<p><i>Influencing Factors among Manufacturing Workers in Nanchang, China</i></p>		<p>rumah tangga, umur, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga per tahun, pengalaman perjalanan</p>	<p>WTP. Pendapatan per tahun secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, orang dengan pendapatan <math>\geq 50,000</math> kemungkinan tidak mau membayar dibandingkan dengan peluang <math>\leq 24,999</math>. Tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, latar belakang pendidikan yang lebih rendah tidak bersedia membayar dibandingkan pendidikan yang lebih tinggi. Status tempat tinggal secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, Dari 600 responden sebanyak 120 warga eksternal tidak bersedia membayar dibandingkan dengan warga lokal. Pengalaman perjalanan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP. Lebih dari 53% responden pekerja manufaktur di Nanchang bersedia membayar untuk</p>
--	--	--	---	---

				perbaikan kualitas lingkungan.
5.	<p>Peneliti: Martin Oteng (2010)</p> <p>Judul: <i>Solid Waste Management in Ghana: Willingness-to-Pay for Improved Services</i></p>	<p>Analisis Regresi Logistik Biner</p>	<p>Variabel dependen: Kesiediaan membayar layanan pengelolaan limbah</p> <p>Variabel independen: jenis kelamin, tingkat pendidikan, status kepemilikan rumah, pendapatan, jenis penyedia layanan, jenis pekerjaan, tanggungan keluarga.</p>	<p>Variabel jenis kelamin secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan bersedia membayar dua kali lebih tinggi daripada kepala rumah tangga laki-laki. Status kepemilikan rumah secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, status kepemilikan rumah sendiri lebih tinggi kesediaan membayarnya dibandingkan dengan menyewa rumah. Jenis pekerjaan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, responden dengan pekerjaan formal bersedia membayar lebih tinggi daripada pekerjaan informal untuk peningkatan layanan. Jenis pelayanan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, responden dengan pelayanan swasta lebih bersedia membayar daripada</p>

				<p>pelayanan publik. Tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, dengan penghasilan yang lebih tinggi atau pekerjaan formal responden lebih bersedia untuk membayar daripada responden yang bekerja di informal karena penghasilannya lebih rendah. Tingkat pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap WTP, responden dengan pendidikan menengah atau lebih tinggi dua kali lipat bersedia membayar daripada responden dengan pendidikan rendah atau dasar. Jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap WTP. Kesiapan membayar dalam memperoleh pelayanan dari tiga zona di dapatkan hasil GH <math>\phi</math> 1,52 di AMA, GH <math>\phi</math> 0,5 di TMA dan GH <math>\phi</math> 1.1 di ODA.</p>
6.	Peneliti: Ramadhan Rajabu Sizya (2015)	Analisis Regresi Logistik Biner	Variabel dependen: kesediaan membayar	Variabel umur tidak berpengaruh signifikan terhadap WTP, umur

	<p>Judul:  <i>Analysis of Inter – Household Willingness to Pay for Solid Waste Management in Mwanza City, Tanzania</i></p>	<p><i>Contingent Valuation Method (CVM)</i></p>	<p>pengelolaan limbah padat</p> <p>Variabel independen: pendapatan, status kepemilikan rumah, pendidikan pengetahuan lingkungan, usia, status pernikahan, dan peraturan hukum tentang lingkungan.</p>	<p>bukan variabel penting dalam menjelaskan keinginan untuk membayar pengelolaan limbah padat. Status pernikahan berpengaruh signifikan terhadap WTP, orang yang sudah menikah mengarpakan lingkungan yg baik dibandingkan yg belum menikah. Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap WTP, Respdn dengan pendapatan tinggi lebih bersedia membayar daripada yang berpenghasilan rendah. Pengetahuan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap WTP, pengetahuan lingkungan tidak mencerminkan kesediaan membayar. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap WTP. Status kepemilikan rumah berpengaruh signifikan terhadap WTP, status rumah berpengaruh karena responden lebih merasa memiliki</p>
--	--	---	---	---

				lingkungan yang baik di sekitar tempat tinggal. peraturan hukum tentang lingkungan berpengaruh signifikan terhadap WTP, Responden yang bersedia membayar untuk pengelolaan limbah padat adalah sebesar 80.3% dan sisanya tidak bersedia membayar. Nilai yang bersedia dibayarkan yaitu berkisar antara 200 – 1000 per bulan.
--	--	--	--	--

Sumber: Berbagai sumber (2018).

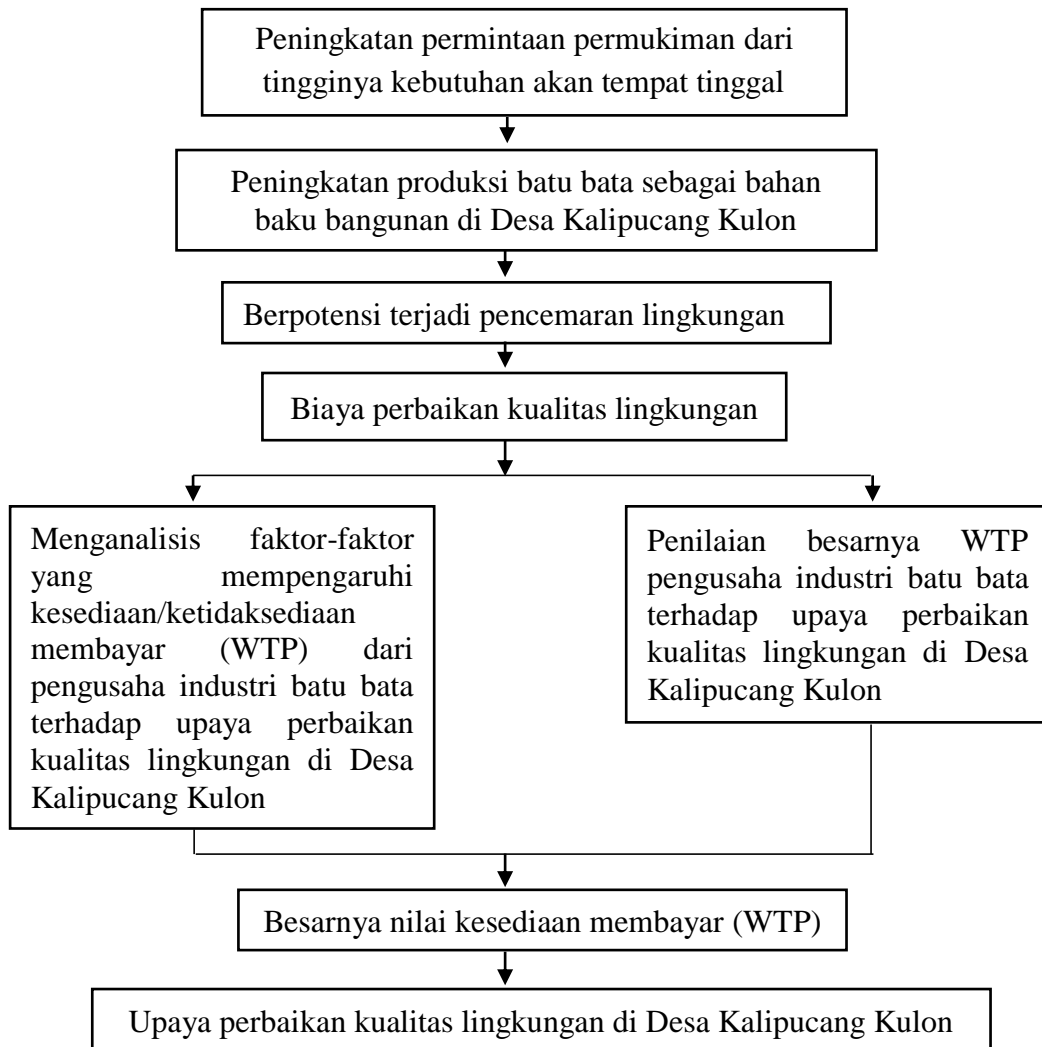
#### 2.4. Kerangka Berpikir

Tiap tahun jumlah penduduk di Jawa Tengah selalu meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berpengaruh terhadap kebutuhan akan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal atau rumah bagi masyarakat di Jawa Tengah masih cukup tinggi yaitu sebanyak 860.385 unit pada tahun 2016, hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah dengan permintaan permukiman tertinggi kedua di Jawa dan kekurangan *backlog* atau perumahan hingga mencapai 2,8 juta unit. Semakin meningkat kebutuhan akan tempat tinggal, semakin besar juga kebutuhan akan bahan baku untuk pembuatan bangunan. Salah satu bahan bakunya adalah batu bata yang merupakan bahan baku untuk pondasi bangunan. Selain itu, permintaan akan batu bata juga dipengaruhi oleh program

rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yaitu pembangunan satu juta rumah yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 2015 dengan pengerjaan yang dilakukan secara bertahap.

Sentra industri batu bata terletak di Desa Kalipucang Kulon, Kabupaten Jepara yang merupakan kabupaten dengan jumlah industri batu bata terbanyak di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.472 unit. Potensi industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon yang sangat baik berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi penduduk desa yang mengembangkan usaha batu bata. Industri batu bata ini menjadi mata pencaharian utama dan penyerapan tenaga kerja yang telah menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat di Desa Kalipucang Kulon. Namun dari berkembang pesat dan semakin bertambahnya industri batu bata juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran udara, menurunnya kualitas tanah, dan menimbulkan gangguan kesehatan. Maka dari itu perlu adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan dengan cara mengeluarkan sejumlah uang atau kesediaan untuk membayar nilai ekonomi yang hilang akibat pencemaran. Nilai ini yang nantinya dikelola pemerintah untuk perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon. Kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang daan perumusan masalah, dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan signifikan dari umur terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.
2. Ada pengaruh positif dan signifikan dari status pernikahan terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.

3. Ada pengaruh positif dan signifikan dari jumlah tanggungan keluarga terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.
4. Ada pengaruh positif dan signifikan dari tingkat kesehatan terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.
5. Ada pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pencemaran lingkungan terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.
6. Ada pengaruh positif dan signifikan dari pendapatan terhadap kesediaan membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha industri batu bata di Desa Kalipucag Kulon sebagian besar adalah laki-laki, berusia antara 26 – 60 tahun. Sebagian besar sudah berkeluarga atau sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga antara 2 – 6 orang serta sudah mempunyai rumah sendiri. Pendidikan terakhir pengusaha batu bata tergolong masih rendah yaitu dari yang tidak tamat SD sampai dengan SMP dan yang pendidikan terakhirnya SMA hanya beberapa. Tingkat kesehatan pengusaha batu bata tergolong rendah dilihat dari banyaknya keluhan kesehatan yang dialami dan pengetahuan pencemaran lingkungan yang cukup. Tingkat pendapatan berkisar antara Rp 900.000 – Rp 5.000.000 per bulan, pendapatan tergolong tinggi karena mayoritas pendapatan industri batu bata sudah di atas UMK Jepara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan responden untuk membayar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon adalah faktor umur berhubungan negatif dengan nilai koefisien -0,115, tingkat kesehatan berhubungan positif dengan nilai koefisien 1,933, dan pengetahuan pencemaran lingkungan berhubungan positif dengan nilai koefisien 2,310.

3. Nilai *Willingness to Pay* (WTP) yang bersedia dibayarkan oleh pengusaha batu bata di Desa Kalipucang Kulon terhadap perbaikan kualitas lingkungan adalah sebesar Rp 2.644.179 per bulan, dengan nilai rata-rata WTP sebesar Rp 3.107 per bulan pada setiap pengusaha batu bata, sehingga total WTP untuk perbaikan kualitas lingkungan dalam satu tahun adalah sebesar Rp 31.730.148.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disarankan:

1. Semakin tinggi umur responden justru semakin rendah kepedulian terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan, maka dari itu perlu adanya penyuluhan tentang dampak industri batu bata terhadap kesehatan dan lingkungan, serta menyampaikan cara meminimalisir dampak negatif terhadap tubuh ketika proses pembuatan batu bata.
2. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang bersedia membayar lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang tidak bersedia membayar upaya perbaikan kualitas lingkungan, oleh karena itu pemerintah diharapkan melakukan pendampingan kepada pengusaha batu bata mengenai pentingnya upaya pelestarian lingkungan.
3. Dari 90 responden yaitu pengusaha batu bata hanya 38 responden yang bersedia membayar dan peduli terhadap lingkungan. Kajian lanjutan dapat dilakukan dengan menyertakan masyarakat umum sebagai responden agar masyarakat yang ikut berperan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Kalipucang Kulon lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, F. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian, M. (2004). *Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Mangrove untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Amalia, F. (2011). *Analisis Kesiediaan Membayar Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Obyek Wisata Tirta Jangari, Waduk Cirata, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Aman, A., Amran, H., & Zuhail, H. (2012). The Influence of Environmental Knowledge and Concern on Green Purchase Intention the Role of Attitude as a Mediating Variable. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 145-167.
- Amanda, S. (2009). *Analisis Willingness to Pay Pengunjung Obyek Wisata Danau Situgede dalam Upaya Pelestarian Lingkungan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. (2017).
- Badan Pusat Statistik. (2017).
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kabupaten Jepara Dalam Angka*. Jepara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara Tahun 2013 - 2017.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2017.
- Eriyati, Indrawati, T., & Anggreina, J. (2010). Analisis Valuasi Ekonomi Lingkungan Kesiediaan Membayar Masyarakat Sekitar Sungai Siak. *Jurnal Ekonomi*, 94-103.
- Fadhilah, S. (2015). *Restorasi Ekosistem mangrove di Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Fafurida, & Nihayah, D. M. (2011). Pengembangan Unit Usaha Industri Kecil Melalui Metode Pemetaan dan "Need Assessment". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 1-14.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2* (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanley, N., & Spash, C. L. (1993). *Cost Benefit Analysis and The Environment*. Hanst-England: Edward Elger Publishing Limited.
- Herdiani, G. (2009). *Analisis Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Perbaikan Lingkungan Perumahan (Kasus Perumahan Bukit Cimanggu City RW 10)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hurlock, E. (1998). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Juhana. (2000). *Arsitektur dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: Bendara.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2012).
- Kementerian PUPR. (2018).
- Kuncoro, M. (2011). *Regresi Logistik dan Diskriminan*. Yogyakarta: UGM.
- Liu, R., Liu, X., Pan, B., Zhu, H., & Yuan, Z. (2018). Willingness to Pay for Improved Air Quality and Influencing Factors among Manufacturing Workers in Nanchang, China. *Sustainability Journal*, 1-11.
- Mu'rifah. (2007). *Materi Pokok Pendidikan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Notoadmodjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nursia, & Harudu, L. (2016). Dampak Penambangan Batu Bata Terhadap Degradasi Lingkungan di Kelurahan Kolasa Kecamatan Perigi Kabupaten Muna. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 115-129.
- Oteng, M. (2010). Solid Waste Management in Ghana: Willingness-to-Pay for Improved Services. *Ghana Journal of Geography*, 86-107.
- Peraturan Kementrian Perindustrian Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Industri Kecil Menengah.*
- Pujiati, A., Nihayah, D. M., & Bowo, P. A. (2017). Strategies of Urban Development Based on Environment. *Advance Science Letters*, 7123-7126.
- Rangkuti, S. (2000). *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Edisi kedua ed.). Surabaya: Airlangga University Press.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, E. M. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tahun 2014*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sekaran, U. (2000). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons Inc.
- Selan, B. (2003). *Keterkaitan Tingkat Kebisingan dan Kesiediaan Membayar Masyarakat untuk Menurunkan Tingkat Kebisingan di Sekitar Bandara*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sizya, R. R. (2015). Analysis of Inter - Household Willingness to Pay for Solid Waste Management in Mwanza City, Tanzania. *Journal of Resources Development and Managemen*, 56-67.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, S. (2006). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. Rajagrafindo.
- Suparmoko. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BEF.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Veronika, V. (2015). Eksternalitas Industri Batu Bata Terhadap Sosial Ekonomi di Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Jom FEKON*, 1-13.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2010). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yakin. (1997). *Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan* (Edisi 1 ed.). Jakarta: Akademika Presindo.